Analisis Penyebab Fenomena Pekerja Anak dan Kekerasan Terhadap Pekerja Anak di India (2017-2024)

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

AMANDA NURRAHMATIA KAMILA CHOIRI

20323158

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

Analisis Penyebab Fenomena Pekerja Anak dan Kekerasan Terhadap

Pekerja Anak di India (2017-2024)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

AMANDA NURRAHMATIA KAMILA CHOIRI

20323158

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Penyebab Fenomena Pekerja Anak dan Kekerasan Terhadap Pekerja Anak di India (2017-2024)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

7 Februari 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Ulami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
2	Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.	
3	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	
4	Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.	

ii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

7 Februari, 2025



Amanda Nurrahmatia Kamila Choiri

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR viii
ABSTRAK ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Cakupan penelitian 7
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 10
1.7 Argumen Sementara 17
1.8 Metode Penelitian 18
1.8.1 Jenis Penelitian *18*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian *18*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data *19*
1.8.4 Proses Penelitian *19*
1.9 Sistematika Pembahasan 20
BAB 2 PEKERJA ANAK DI INDIA 21
2.1. Sejarah dan Perkembangan Pekerja Anak di India 21
2.2. Pandangan Masyarakat Lokal Mengenai Pekerja Anak di India 24
2.3. Upaya Pemerintah India dalam Menangani Pekerja Anak di India 26
2.3.1. Kebijakan untuk Tidak Mengizinkan Anak di bawah Umur 14 Tahun untuk Bekerja *27*
2.3.2. Kebijakan untuk Mengizinkan Anak di atas Umur 14 Tahun untuk Bekerja *27*
2.3.3. Kebijakan untuk Mengembangkan Kejuruan dalam Minat dan Bakat dan Anak *28*
2.3.4. Kebijakan untuk Memberikan dan Mewajibkan Pendidikan dengan Memberikan Pendidikan Gratis *29*

2.3.5. Upaya Pemerintah India dalam Menangani Pekerja Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 *29*

2.4 Upaya Pemerintah dalam Membentuk Undang-Undang Pekerja Anak Sesuai dengan Peraturan dan Syarat Pekerja Anak Menurut International Labour Organization **30**

BAB 3 ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SULITNYA MENGHILANGKAN PEKERJA ANAK DI INDIA **34**

3.1. Kekerasan Kultural (Cultural Violence) **34**

3.1.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Religion *35*

3.1.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideology *39*

3.2 Kekerasan Struktural (Structural Violence) **43**

3.2.1 Kekerasan Struktural dalam Well-being Needs terhadap Pekerja Anak di India *44*

3.2.2 Kekerasan Struktural dalam Freedom Needs terhadap Pekerja Anak di India *47*

3.3 Kekerasan Langsung (Direct Violence) **49**

3.3.1 Kekerasan Langsung dalam Well-being Needs terhadap Pekerja Anak di India *50*

3.3.2 Kekerasan Langsung dalam Identity Needs terhadap Pekerja Anak di India *52*

BAB 4 PENUTUP **54**

4.1. Kesimpulan **54**

4.2. Rekomendasi **59**

DAFTAR PUSTAKA **60**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. The Chosen and The Unchosen 11
Tabel 1. 2. A Typology of Structural Violence 13
Tabel 1. 3. A Typology of Direct Violence 15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1. Jumlah dan Sebaran Pekerja Anak di India Berdasarkan Usia Tahun 2018-2019 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Johan Galtung Violence Triangle Model 11

ABSTRAK

Pekerja anak merupakan salah satu pelanggaran hukum yang memiliki efek panjang jika tidak diberantas. India menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam kasus pekerja anak. Namun hingga saat ini, permasalahan pekerja anak ini belum dapat diatasi baik oleh pemerintahnya maupun organisasi internasional. Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pekerja anak di negara. Namun berbagai macam faktor yang mempengaruhi sulitnya mengatasi permasalahan pekerja anak ini. Faktor-faktor ini akan dianalisis menggunakan konsep Violence Triangle milik Johan Galtung. Melalui tiga indikator yang ada di dalam konsep Violence Triangle milik Johan Galtung yaitu, Kekerasan Kultural, Kekerasan Struktural, dan Kekerasan Langsung. Tiga indikator ini akan membantu untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya menghilangkan praktik pekerja anak di India. Dimulai dengan latar belakang pekerja anak di India, upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan dalam mengurangi pekerja anak di India, hingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak.

Kata-kata kunci: Pekerja Anak, India, *Violence Triangle*, Kekerasan Kultural, Kekerasan Struktural, Kekerasan Langsung

ABSTRACT

Child labor is a serious legal violation with long-term effects if not eradicated. India is one of the countries with a long history of child labor cases. However, to this day, the issue of child labor has not been fully addressed by either the government or international organizations. The Indian government has made various efforts to tackle child labor in the country. However, numerous factors contribute to the difficulty of solving this problem. These factors will be analyzed using Johan Galtung's Violence Triangle concept. Through the three indicators within Galtung's Violence Triangle—Cultural Violence, Structural Violence, and Direct Violence—this framework will help identify the factors that make it challenging to eliminate child labor practices in India. The discussion begins with the background of child labor in India, the efforts the government has undertaken to reduce child labor, to the factors that cause violence against child workers.

Keywords: Child Labour, India, Violence Triangle, Cultural Violence, Structural Violence, Direct Violence

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja anak adalah istilah yang mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di bawah usia yang sesuai, yang memiliki dampak negatif pada pendidikan, perkembangan fisik dan mental mereka, serta kesejahteraan secara keseluruhan (ILO 1999). Umur anak-anak dianggap sebagai pekerja anak adalah saat berumur minimal 15 tahun, dengan catatan pekerjaan tersebut tidak berbahaya bagi anak-anak, dan tidak kurang dari 18 tahun untuk pekerjaan yang memiliki risiko bahaya yang lebih besar (ILO 2009a). Anak-anak seharusnya masih dalam masa pendidikan dan pertumbuhan, sehingga memberikan ataupun mempekerjakan anak di bawah umur merupakan hal yang dilarang karena anak belum mampu. Anak-anak yang memiliki pendidikan akan dapat berperan besar baik bagi pembangunan negara, ekonomi, maupun kepribadian yang baik. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, dikhawatirkan anak-anak tidak memiliki edukasi yang maksimal untuk membangun potensi mereka.

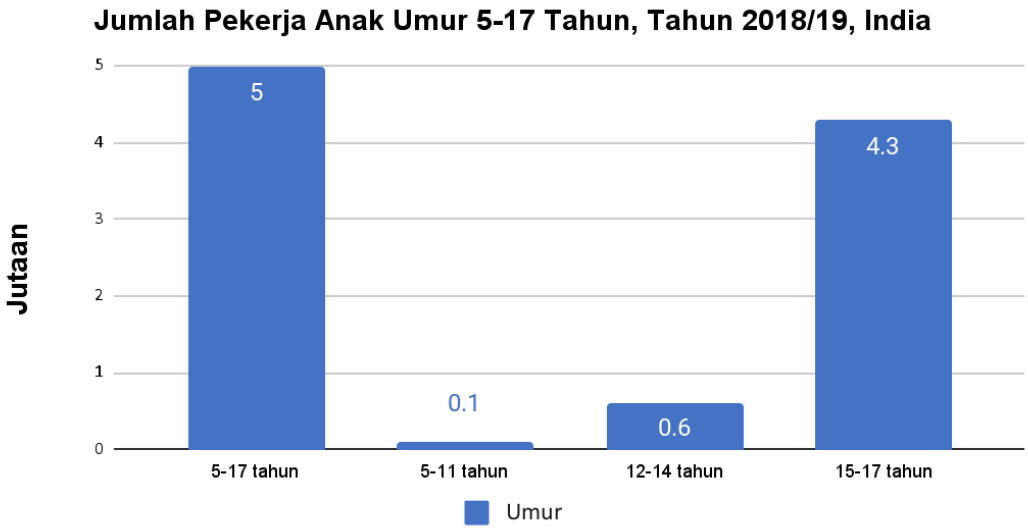
Namun, meskipun demikian terdapat anak yang menjadi tenaga kerja, hal ini dapat didorong oleh berbagai macam faktor, seperti kurangnya penghasilan orang tua sehingga anak harus bekerja untuk membantu memenuhi kehidupan keluarga, anak yang tidak sekolah sehingga bekerja karena tidak memiliki kegiatan ataupun pilihan maupun kesempatan untuk sekolah, dan juga adanya anak-anak yang telah menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya sehingga harus memenuhi kehidupan keluarga barunya. Kemiskinan dalam rumah tangga menjadi salah satu

alasan mengapa anak-anak bekerja, dampak dari kemiskinan dalam keluarga dapat menjadi lebih parah dengan anak-anak yang kesulitan untuk bersekolah dengan layak (Ray 2001). Meskipun demikian, banyak negara telah berusaha untuk membantu ataupun menangani pekerja anak di negaranya, seperti dengan memberikan tunjangan fasilitas sekolah gratis, memberikan dana kepada keluarga yang kurang mampu, atau membiayai beasiswa untuk anak keluarga yang kurang mampu agar dapat bersekolah dan melanjutkan sekolahnya daripada bekerja.

Sensus data 2011 mengungkapkan bahwa India telah berhasil menurunkan praktik pekerja anak dari periode sebelumnya yaitu tahun 2001. Pada tahun 2001 sensus mengungkapkan bahwa praktik pekerja anak di India sekitar 12,6 juta dan mengalami penurunan menjadi 4,6 juta anak pada tahun 2011. Yang mana pada tahun 2011 India berhasil untuk menurunkan praktik pekerja anak hingga 20% dari angka sensus terakhir pada tahun 2001 (India 2011).

Meskipun sensus menunjukkan data pekerja anak yang mengalami penurunan pada tahun 2011. Namun praktik pekerja anak di India masih terjadi di tahun-tahun setelahnya. Permasalahan pekerja anak ini belum dapat dituntaskan sepenuhnya. Dibuktikan dengan data dari UNICEF:

Grafik 1. 1. Jumlah dan Sebaran Pekerja Anak di India Berdasarkan Usia Tahun 2018-2019



Sumber: (UNICEF 2024)

Dalam grafik data tersebut dijabarkan pekerja anak di India pada tahun 2018-2019. Bahwa pada tahun 2018-2019 pekerja anak di India dimulai dari umur 5-11 tahun sebanyak 100 ribu anak, 12-14 tahun sebanyak 600 ribu anak, 15-17 tahun sebanyak 4,3 juta anak, dengan total keseluruhan pekerja anak rentang umur 5-17 tahun sebanyak 5 juta pekerja anak di India pada tahun 2018-2019 (UNICEF 2024). Selain itu, menurut data tahun 2020, pekerja anak di India terdapat 1500 pekerja anak yang diselamatkan dari pekerja anak (Mondal 2021). Terdapat juga lebih dari 4000 anak yang berasal dari negara-negara yang berbeda, yang mana angka ini tidak pernah melewati dari 2000 anak dalam lima tahun terakhir (Mondal 2021).

Permasalahan pekerja anak ini dapat mengarah kepada permasalahan-permasalahan lainnya yang dialami oleh anak-anak, salah satunya adalah pekerja

anak dapat menjadi salah satu penyebab kekerasan juga dialami oleh anak-anak di India. Pada tahun 2018, *National Crime Records Bureau* mengungkapkan bahwa terdapat 464 kasus yang terdaftar di bawah *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act 2016*. Kemudian menurut data yang dirilis oleh *The National Crime Records Bureau* (NCRB) terdapat sekitar 2151 *child trafficking* pada tahun 2020, yang mana *child trafficking* di masa Pandemi kebanyakan dijual untuk menjadi pekerja anak paksa (NCRB 2024).

Pada tahun 2020 juga diketahui bahwa laporan mengenai kekerasan yang didapatkan oleh pekerja anak mengalami kenaikan. *The Childline Help Number* mempublikasikan terdapat total 3653 kasus pekerja anak yang terjadi pada tahun 2020, yang terdiri dari 35% sebagai pengemis, 21% melakukan pekerjaan berbahaya, 14% bekerja di restoran, 10% bekerja di pekerjaan rumah tangga, 8% di unit keluarga, dan 4% sebagai pekerja terikat (Kaur and Byard 2021).

Selain itu, *The Childline India Foundation* melaporkan bahwa terjadi kenaikan hingga 50% terhadap laporan terhadap kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibandingkan hari biasa, 30% dari laporan tersebut terkait dengan kekerasan terhadap pekerja anak. Dilaporkan sekitar 53% anak-anak di India pernah mengalami berbagai macam kekerasan, termasuk pemaksaan foto telanjang, penyerangan, hingga pelecehan seksual (Poddar and Mukherjee 2020). Selama bulan Maret hingga Juni 2020, *India's child helpline* 1098, menerima hampir 400.000 telepon laporan dari seluruh negeri. Dan setahun kemudian pada tahun

2021, dalam 24 jam, *India's child helpline*, menerima peningkatan laporan 40% hingga 50%, yang mana sekitar 5.000 laporan per hari (Insider 2021).

Kekerasan terhadap para pekerja anak di India ini telah melanggar norma Internasional. Kekerasan terhadap pekerja anak ini telah melanggar Konvensi *International Labour Organization* nomor 138 tahun 1973 dan Konvensi *International Labour Organization* nomor 182 tahun 1999 yang telah diratifikasi oleh India pada 13 Juni 2017 dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke-106 di Jenewa. Konvensi ILO nomor 138 mengatur mengenai usia minimal anak boleh bekerja yaitu usia 15-18 tahun, namun untuk negara berkembang usia minimal dimulai dari usia 14-18 tahun. Namun di India, terdapat pekerja anak berusia 5-13 tahun, sehingga praktik pekerja anak ini telah melanggar Konvensi ILO nomor 138.

Kemudian Konvensi ILO nomor 182 mengenai larangan terhadap bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, konvensi ini memiliki 16 pasal dengan beberapa ketentuan utama yaitu larangan terhadap semua bentuk perbudakan seperti perdagangan anak dan kerja paksa, penggunaan anak dalam sektor prostitusi dan pornografi, penggunaan anak kegiatan berbahaya dan terlarang seperti penjualan dan pengedaran narkoba, dan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, hingga moral anak (ILO 1999). Namun kekerasan yang dialami oleh para pekerja anak di India melibatkan berbagai jenis kekerasan mulai dari *child trafficking*, anak perempuan bekerja di sektor prostitusi, hingga pekerja anak di sektor dan lingkungan berbahaya. Sehingga bentuk kekerasan yang dialami oleh pekerja anak di India ini telah melanggar Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999.

India terkenal telah melakukan praktek kerja tenaga anak sejak zaman dahulu, dan masih berlangsung hingga sekarang, meskipun negara memiliki peraturan mengenai larangan praktek kerja anak. Namun hal ini belum dapat mengubah dan menghilangkan praktik kerja anak di India, yang tanpa sengaja telah menjadi hal yang wajar dan tidak aneh di India. Praktek kerja anak di India juga telah dilarang oleh pemerintah India namun, masih banyak orang yang belum menaati dan tetap melakukan praktik kerja anak ini bahkan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pemerintah. Seringnya pemaksaan terhadap anak, maupun faktor lingkungan yang menyebabkan tenaga kerja anak di India masih terjadi.

Upaya yang dilakukan pemerintah India juga belum memberikan hasil yang diinginkan, meskipun telah melakukan berbagai upaya seperti amandemen undang-undang, membuat berbagai kebijakan, dan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi, namun permasalahan kekerasan terhadap pekerja anak ini belum dapat diatasi seluruhnya. Perlu diketahui faktor apa saja yang masih menyebabkan kekerasan terhadap pekerja anak meskipun India telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 dan nomor 182. Sehingga penelitian ini akan berfokus terhadap mengapa kekerasan terhadap pekerja anak di India masih terjadi hingga sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa fenomena kekerasan terhadap pekerja anak di India masih terus berlanjut dari tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai kekerasan yang dialami pekerja anak di India yang akan dianalisis menggunakan konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor dan akar yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak di India setelah pengesahan ratifikasi Konvensi ILO di India dengan menggunakan konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan mencakup dari tahun 2017 karena pada tahun tersebut India meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 dan nomor 182 yang mana mengatur mengenai umur pekerja anak dan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pekerja anak, namun menurut data terdapat pekerja anak di bawah dan pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya, hingga tahun 2024 dikarenakan pekerja anak masih terjadi di India hingga tahun 2024. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus mengenai fenomena pekerja anak dari konteks jumlah, namun juga fenomena kekerasan yang dialami oleh para pekerja anak di India. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai kekerasan yang didapatkan oleh para pekerja anak di India dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk dapat lebih membantu dalam memahami topik penelitian yang ingin dibahas, penelitian ini menggunakan 3 referensi tinjauan pustaka yang dapat membantu memahami kajian yang ingin diteliti.

Dalam jurnal yang pertama berjudul Analisis Peran *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitasi Anak di India, milik Abbas mengatakan bahwa dilaporkan bahwa setidaknya terdapat 120 hingga 140 pekerja anak di India yang harus bekerja selama 12 jam dalam sehari, di mana pekerjaan yang dilakukan juga beragam mulai dari menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan banyak pekerjaan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak di India juga beragam mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga pekerjaan berat seperti buruh pabrik di mana anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Terdapat juga anak-anak yang dipaksa untuk bekerja secara berlebihan atau *overtime* dengan upaya yang minimum namun anak-anak tersebut tidak dapat melawan. Anak-anak ini dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan orang tangga (Abbas 2022).

Dalam jurnal yang kedua adalah milik Natasha Calista dengan judul Kendala *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Dalam Usaha Kasus Mengurangi Pekerja Anak di India, Calista menuliskan bahwa ILO atau *International Labour Organization* yang merupakan organisasi Internasional yang

membantu memberantas pekerja anak di India namun belum dapat membantu sepenuhnya karena, pekerja anak telah terjadi sejak lama, dan tidak mudah untuk menghilang sesuatu yang telah lama dilakukan dan juga biasa dilakukan sehingga UNICEF berusaha untuk membantu menghilangkan pekerja anak di India namun belum dapat dihilangkan, namun UNICEF juga masih belum dapat menghapuskan pekerja anak di India dan hanya dapat mengurangi sementara karena kemungkinan pekerja anak di India dapat kembali melonjak, sehingga perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah dan organisasi internasional seperti UNICEF untuk membantu menghilangkan pekerja anak di India (Callista 2022).

Jurnal ketiga dengan judul yang ditulis Upaya ILO Dalam Menangani Eksploitasi Pekerja Anak di India Melalui *Converging Against Child Labour: Support For India's Model* oleh Nada Nafisah menuliskan mengenai organisasi *International Labour Organization* atau ILO yang membantu untuk menangani pekerja anak di India di mana, pekerja anak tersebut belum dapat diselesaikan bahkan dengan bantuan ILO, sehingga diperlukan upaya lain dalam menyelesaikan pekerja anak di India, ILO membantu dalam menangani eksploitasi anak yang dilakukan secara ilegal. Eksploitasi yang dilakukan kepada anak-anak juga secara perlahan dapat merusak mental, kesehatan, pengembangan diri, maupun pendidikan. Kemiskinan yang parah juga menjadi salah satu alasan pekerja anak di India menjadi besar, kemiskinan yang membesar ditambah laju pertumbuhan penduduk yang ikut membesar memperparah kondisi, kemiskinan yang semakin parah ini kemudian berdampak kepada banyak aspek dalam masyarakat pendidikan

yang kurang, banyaknya pengangguran, hingga akhirnya orang tua memilih untuk mempekerjakan anak-anaknya, sehingga disinilah peran ILO dibutuhkan sebagai organisasi internasional untuk membantu menghilangkan pekerja anak di India (Nafisah 2018).

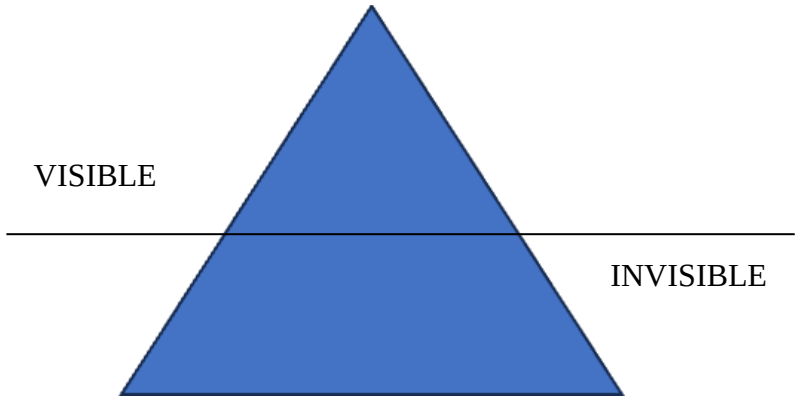
Dengan melihat tinjauan pustaka di atas, terdapat kekurangan di mana, belum membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak di India. Sehingga penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap pekerja anak di India masih terjadi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep segitiga kekerasan atau *violence triangle* milik Johan Galtung. Menurut etimologi, *violence* atau kekerasan berasal dari Bahasa latin yaitu "*vis*" yang memiliki arti kekuatan atau daya dan "latus" yang berasal dari kata "*ferre*" yang memiliki arti membawa (Firdausi and Susanti 2018). Sehingga menurut etimologi, *violence* memiliki arti membawa kekuatan.

Johan Galtung sendiri merupakan seorang akademis terkemuka dengan pemikiran mengenai perdamaian. Salah satu, konsep yang paling populer dari Johan Galtung adalah segitiga kekerasan atau *violence triangle* (Galtung 1990). Johan Galtung menafsirkan dan membagi *violence triangle* menjadi tiga bagian. Bagian-bagian tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama, Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*), Kekerasan Struktural (*Structural Violence*), dan Kekerasan Langsung (*Direct Violence*) (Galtung 1990).

Gambar 1. 1. Johan Galtung Violence Triangle Model



Sumber: (Galtung 1990)

A. Kekerasan Kultural

Tabel 1. 1. The Chosen and The Unchosen

God Chooses	*And Leaves to Satan*	*With the Consequence of*
Human Species	*Animals, Plants, Nature*	*Speciesism, Ecocide*
Men	*Women*	*Sexism, Witch-burning*
His People	*The Others*	*Nationalism, Imperialism*

Whites	*Colored*	*Racism, Colonialism*
Upper Classes	*Lower Classes*	*'Classism',* *Exploitation*
True Believers	*Heretics, Pagans*	*'Meritism', Inquisition*

Sumber: **(Galtung 1990)**

Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*) dibagi menjadi beberapa aspek-aspek agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris, dan ilmu formal seperti logika dan matematika, dan *cosmology*. Aspek ***Religion*** menurut Johan Galtung adalah adanya kelompok tertentu yang merasa lebih berkuasa ataupun lebih tinggi dikarenakan mereka merupakan kelompok pilihan Tuhan. ***Ideology*** menurut Johan Galtung merupakan orang pilihan tuhan namun dengan bentuk negara, sehingga orang atau kelompok yang berbeda akan digambarkan sebagai *The Others* atau pilihan setan. ***Language*** menurut Johan Galtung dapat lebih menyerang secara verbal karena bahasa dapat digunakan untuk menyerang mental seseorang. ***Art*** menurut Johan Galtung dapat menggambarkan sebuah sejarah di masa lalu yang dapat menyebabkan sebuah kelompok merasa dapat melakukan kekerasan kepada kelompok lain. ***Empirical Science*** menurut Johan Galtung adalah sebuah negara yang dianggap lebih rendah dibandingkan negara lain dikarenakan tidak memiliki teknologi maupun tenaga kerja sehingga harus bergantung kepada negara lain.

Formal Science menurut Johan Galtung adalah kekerasan yang disebabkan oleh adanya kesimpulan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan teori matematika yang mana hanya menghasilkan dua kemungkinan yaitu valid dan invalid. Dan ***Cosmology*** menurut Johan Galtung adalah perbedaan manusia dan alam, yang mana alam dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perpecahan antar manusia (Galtung 1990).

A. Kekerasan Struktural

Tabel 1. 2. A Typology of Structural Violence

	Survival Needs	*Well-being Needs*	*Identity Needs*	*Freedom Needs*
Structural Violence	*Exploitation A*	*Exploitation B*	*Penetration, Segmentation*	*Marginalization, Fragmentation*

Sumber: **(Galtung 1990)**

Dalan tabel diatas, dijabarkan bahwa *Structural Violence* milik Johan Galtung terdiri dari ***Survival Needs***, ***Well-being Needs***, ***Identity Needs***, dan ***Freedom Needs***. ***Survival Needs*** berisi *Exploitation A*, ***Well-being Needs*** berisi *Exploitation B*, ***Identity Needs*** berisi *Penetration* dan *Segmentation*, dan ***Freedom Needs*** berisi *Marginalization* dan *Fragmentation* (Galtung 1990).

Survival Needs yang berisi *Exploitation A* berarti bentuk ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi antara *topdogs* dan *underdogs* hingga menyebabkan eksploitasi bagi *underdogs* dalam bentuk persetujuan ataupun pemaksaan terhadap seseorang untuk dijadikan pekerja ataupun perbudakan, baik secara kekerasan fisik maupun non fisik yang diterima oleh seseorang yang mereka lakukan sebagai bagian dari bertahan hidup. Menurut Johan Galtung, eksploitasi merupakan pusat bagian dari kekerasan struktural, di mana *topdogs* mendapatkan lebih banyak kebutuhan di luar interaksi dalam sebuah struktur daripada orang lain atau *underdogs*. *Underdogs* tidak akan mendapatkan kesempatan hingga mereka meninggal dikarenakan kelaparan atau terkena wabah (Galtung 1990).

Well-being Needs yang berisi *Exploitation B* berarti *underdogs* ini dieksploitasi terus menerus, mereka ditinggalkan secara permanen, keadaan kesengsaraan yang tidak diinginkan, yang biasanya termasuk ke dalam malnutrisi dan penyakit (Galtung 1990).

Identity Needs berisi *Penetration* dan *Segmentation*. *Penetration* mengacu pada cara kelompok tertentu yang diintegrasikan ke dalam sistem penindasan yang mengeksploitasi tenaga kerja namun tidak memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada mereka. Dimana, *topdogs* atau pihak yang memiliki kekuasaan akan masuk ke dalam pihak *underdogs* dan mempengaruhi hingga mengubah cara pandang mereka terhadap tindakan eksploitasi yang mereka lakukan. Dan *Segmentation* adalah mengkategorikan suatu kelompok dalam masyarakat, seperti pembagian ras, etnis, maupun status sosial, yang mana pengkategorian ini dapat

menciptakan hierarki, mengistimewakan suatu kelompok sehingga kelompok lainnya terpinggirkan. Kombinasi dari *Segmentation* ini, digunakan untuk membuat pihak *underdog* hanya dapat melihat beberapa sudut pandang yang diberikan oleh pihak *topdog*, sehingga mereka tidak memiliki sudut pandang dan pola pikir lainnya (Galtung 1990).

Freedom Needs berisi *Marginalization* dan *Fragmentation*. *Marginalization* berarti pengucilan terhadap suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada ras etnis gender dan status sosial. Marginalisasi ini dilakukan agar kelompok masyarakat yang dikucilkan ini tidak dapat memiliki hak dan pilihan sendiri. Sedangkan *Fragmentation* adalah membagi dan memecah belah kelompok kalangan bawah sehingga tidak adanya persatuan dan solidaritas dalam kelompok mereka. *Marginalization* menjaga agar kelompok kelas bawah tetap dikucilkan di luar struktur kelompok masyarakat, yang dikombinasikan dengan *Fragmentation* yang menjaga kelompok kelas bawah ini agar tetap terpecah belah dan tidak bersatu (Galtung 1990).

B. Kekerasan Langsung

Tabel 1. 3. A Typology of Direct Violence

	Survival Needs	*Well-being Needs*	*Identity Needs*	*Freedom Needs*

Direct Violence	*Killing*	*Maiming, Siege, Sanctions, Misery*	*Desocialization, Resocialization, Secondary Citizen*	*Repression, Detention, Expulsion*

Sumber: **(Galtung 1990)**

Dalam tabel diatas, dijelaskan bahwa *Direct Violence* terjadi dari ***Survival Needs*** yang berisi *Killing*, ***Well-being Needs*** yang berisi *Maiming, Siege, Sanctions,* dan *Misery*, ***Identity Needs*** yang berisi *Desocialization, Resocialization,* dan *Secondary Citizen*, ***Freedom Needs*** yang berisi *Repression, Detention,* dan *Expulsion* (Galtung 1990).

Survival Needs yang berisi *Killing* atau pembunuhan atau mengakhiri kehidupan seseorang. ***Well-being Needs*** yang berisi *Maiming* yang mengacu pada kekerasan fisik serius yang menyebabkan cedera bahkan cacat permanen. Bentuk dari kekerasan ini dampak menurunkan kualitas hidup korban. *Siege* atau blokade atau sebuah taktik pengurungan dalam perang. *Sanctions* adalah sanksi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan, namun konsekuensinya adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. *Misery* yang berarti penderitaan, merupakan bentuk kekerasan dengan memberikan penderitaan dan berakhir dengan kematian perlahan (Galtung 1990).

Identity Needs yang berisi *Desocialization* yang berarti menghilangkan identitas, koneksi sosial, dan budaya pada individu atau kelompok sehingga dapat menyebabkan permasalahan psikologi. *Resocialization* yang berarti memaksa individu atau kelompok untuk melakukan budaya tertentu sehingga dapat dikontrol. *Secondary Citizen* yang mengacu kepada bentuk memaksakan individu atau kelompok untuk melakukan budaya dari kelompok yang lebih dominan di publik atau kehidupan sehari-hari. Dalam ***Freedom Needs*** terdapat *Repression* yang berarti halangan terhadap individu ataupun kelompok terhadap sosial dan politik yang disebabkan oleh budaya. *Detention* adalah penahanan terhadap individu atau kelompok sehingga menyebabkan kerugian secara fisik maupun mental. *Expulsion* adalah menahan individual atau kelompok agar tidak dapat pergi keluar, biasanya larangan bepergian ke luar negeri (Galtung 1990).

Jika ketiga indikator ini dikaitkan dengan kekerasan terhadap pekerja anak di India, maka pekerja anak di India memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Sehingga konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pekerja anak di India untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak di India.

1.7 Argumen Sementara

Pekerja Anak di India membuktikan bahwa kegagalan keamanan dalam struktur sosial masyarakat yang dapat dikaji dengan konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung. Dalam konsep ini terdapat tiga indikator yang dapat digunakan,

yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural disebabkan oleh adanya berbagai macam faktor yang ada dalam masyarakat menyebabkan adanya perbedaan dalam kehidupan masyarakat di India. Kekerasan struktural dapat terjadi dikarenakan, adanya perbedaan yang terjadi dalam kekerasan kultural menyebabkan masyarakat yang lebih rendah dapat mengalami kekerasan struktural dalam bentuk eksploitasi oleh masyarakat kalangan atas, dan kekerasan langsung menjadi salah satu bentuk dari pengimplementasian dari kekerasan-kekerasan yang sebelumnya telah ada di masyarakat, seperti kekerasan yang didapatkan oleh pekerja anak untuk menunjukkan bukti kekuasaan dan dominasi dengan menggunakan kekerasan langsung.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, proses dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyampaikan kesimpulan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti adalah pekerja anak di India. Objek yang diteliti adalah kondisi dan pihak yang terlibat dan menyebabkan terjadinya kekerasan yang dialami oleh para pekerja anak di India.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan deskripsi dan teori, datanya bersifat data sekunder di mana menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, dan media lainnya, baik *online* maupun *offline* untuk mengumpulkan data.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Mencari Data

Mengumpulkan data-data digunakan untuk membantu menulis penelitian yang didapatkan dari data sekunder.

2. Menganalisis data

Data akan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk melakukan penelitian.

3. Menggunakan Konsep

Setelah mengumpulkan data akan digunakan untuk menganalisis, data akan dianalisis juga dengan konsep *violence triangle* milik Johan Galtung.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan proses penelitian.

BAB II Pekerja Anak di India

Bab ini membahas mengenai bagaimana sejarah, perkembangan, pandangan masyarakat mengenai pekerja anak di India, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah India dalam mengatasi pekerja anak di India.

BAB III Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sulitnya Menghilangkan Pekerja Anak di India.

Bab ini membahas mengenai analisis faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan terhadap pekerja anak di India dengan menggunakan konsep Violence Triangle milik Johan Galtung.

BAB IV PENUTUP.

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2

PEKERJA ANAK DI INDIA

2.1. Sejarah dan Perkembangan Pekerja Anak di India

India merupakan salah satu negara terbesar di benua Asia Selatan, yang berbatasan dengan Tiongkok, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Myanmar dengan garis pantai sepanjang 7.516,6 kilometer (KBRI 2018). India yang merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris selama kurang lebih 200 hingga akhirnya merdeka pada tahun 15 Agustus 1947 (Amien Ibrahim 2022). Semenjak kemerdekaan, India berusaha untuk mengembangkan, memperkuat, dan memperluas ekonominya, namun pada saat itu, jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya, pertumbuhan perekonomian negara India masih jauh dari negara berkembang lainnya. Pada saat sekarang, India termasuk salah satu tempat strategis yang dipikirkan matang-matang oleh investor yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan basis produksi luar negeri investor dan perusahaan besar. Meskipun telah menjadi salah satu kawasan yang dipertimbangkan untuk dijadikan pusat basis produksi luar negeri investor dan perusahaan besar, namun praktik kerja anak di India masih termasuk salah satu praktik pekerja anak terbesar di dunia.

Meskipun perkembangan perekonomian naik secara signifikan, namun hal ini belum dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan di negara tersebut, yang mana lebih dari sepertiga penduduk India hidup di dalam garis kemiskinan. Penduduk

dan keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terpaksa mempekerjakan anak mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pekerja anak di India telah lama terjadi, pada tahun 1986 telah dikeluarkan undang-undang mengenai larangan dan peraturan pekerja anak dan remaja yang telah mengalami amandemen pada tahun 2016 (CLPR 2016). Dalam undang-undang CLPR, anak-anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 14 tahun dan dilarang untuk mempekerjakan anak-anak bahkan sebagai pembantu dalam rumah tangga. Anak-anak yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat didefinisikan sebagai anak yang memasuki usia remaja dan remaja diizinkan untuk bekerja menurut undang-undang namun tidak dalam pekerjaan yang berbahaya seperti pertambangan, bahan peledak, bahan kimia, bahan yang mudah terbakar dan bahan berbahaya lainnya yang sesuai dengan Undang-undang pabrik, tahun 1948 (CLPR 1986).

Pada saat Covid-19, angka pekerja anak naik hingga 5% dari tahun sebelum Covid-19 terjadi (International 2022). Pada tahun 2016, 20-25 persen dari 100 juta pekerja migran merupakan pekerja anak, dan menurut UNICEF lebih dari 10 juta anak masih berada di dalam perbudakan pekerja anak, di mana hal ini dapat meningkat saat pandemi didukung dengan 1,5 juta sekolah yang tutup menjadi peluang bagi anak-anak yang tidak bersekolah untuk terlibat dalam praktik pekerja anak (Soni 2021). Konstitusi India menuangkan hak fundamental sesuai dengan pasal 24 yang mana melarang pekerja anak di industri berbahaya namun tidak melarang dalam industri tidak berbahaya (India 2015). Organisasi perburuhan

Internasional (ILO) memperkirakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor pengguna dan penyedia pekerja anak terbesar di dunia, namun di India di luar sektor pertanian, hampir di semua sektor pekerja baik formal maupun informal ditemukan pekerja anak. Selain dibuatnya larangan konstitusional terhadap pekerja anak dalam sektor yang berbahaya bagi anak di India, undang-undang lainnya seperti undang-undang peradilan anak (pengasuhan dan perlindungan) tahun 2000, dan undang-undang larangan dan penghapusan pekerja anak tahun 1986 memberikan kekuatan dan landasan hukum untuk mengidentifikasikan bagi pekerja anak dalam sektor yang berbahaya agar dapat diadili, dan dihentikan.

Pada awalnya pekerja anak di India merupakan hal yang dianggap biasa dan merupakan pekerjaan sehari-hari yang normal. Di India sendiri awalnya hampir tidak ada peraturan atau ketentuan terutama secara undang-undang yang mengatur mengenai istilah "pekerja anak" secara tepat, bahkan belum terdapat peraturan dan ketentuan legislatif yang mengatur mengenai usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja secara jelas. Pekerja anak di India dilakukan sesuai dengan tingkatan dan kasta yang ada di masyarakat, semakin tinggi kasta keluarga di masyarakat semakin besar kemungkinan anak yang berasal dari keluarga tersebut tidak mengalami praktik kerja anak, namun sebaliknya semakin rendah kasta keluarga maka kemungkinan besar anak dari keluarga tersebut akan dijadikan pekerja anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan dapat bekerja pada keluarga dengan kasta yang lebih tinggi sebagai pekerja rumah tangga. Sistem ini dulunya dianggap merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang dan perkembangan

anak, mereka menganggap hal ini merupakan hal yang membantu dalam perkembangan dan tahapan tumbuh kembang yang dapat memberikan bekal hidup bagi anak-anak dari pengalaman yang sehat dan tidak memberikan dampak buruk bagi kepribadian anak-anak. Pekerja anak di India dikerjakan untuk memenuhi kemampuan alami dan potensi kreatif anak-anak. Namun dengan berkembangnya zaman, pekerja anak di India menjangkau berbagai sektor bahkan yang berbahaya dan seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak.

2.2. Pandangan Masyarakat Lokal Mengenai Pekerja Anak di India

Pekerja anak di India sendiri merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di dalam kehidupan masyarakat India. Masyarakat di India sendiri karena telah terbiasa dengan anak-anak yang bekerja ini, memandang bahwa pekerja anak ini merupakan hal dan kegiatan yang biasa. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat pekerja anak menjadi salah satu pilihan yang digunakan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak yang dapat digunakan sebagai tenaga kerja, juga dapat lebih dicari dari tenaga kerja orang dewasa, atau bahkan ahli, untuk di beberapa sektor bidang kecil yang memang tidak membutuhkan kemampuan tenaga ahli. Hal ini dikarenakan dalam sektor tersebut, para pekerja anak dapat diberikan beban pekerjaan yang hampir setara atau bahkan sama, namun dengan upah atau gaji yang lebih minim atau lebih rendah daripada menggunakan tenaga kerja orang dewasa, sehingga pekerja anak lebih diinginkan dan dibutuhkan dalam sektor bidang mikro. Bahkan, tenaga kerja anak menjadi hal yang diincar oleh investor mengingat, keterampilan kerja yang kurang, standar kerja yang

rendah, membuat pekerja anak dapat dibayar dengan upah yang rendah namun dengan waktu kerja yang sama dengan pekerja dewasa (Safitri 2022).

Dalam hal ini, masyarakat lokal memandang fenomena pekerja anak ini sebagai hal yang biasa terjadi dan biasa dilakukan. Mengingat, memperkerjakan anak merupakan bagian dari kehidupan yang mana juga telah dilakukan di India selama bertahun-tahun. Dikarenakan adanya anggapan dan pandangan normal dalam perilaku dan kegiatan pekerja anak ini, menyebabkan hal ini dipandang sebagai hal yang normal dalam bagian dari kehidupan masyarakat (Safitri 2022). Masyarakat lokal, kebanyakan tidak akan berpikiran bahwa pekerja anak merupakan hal yang tidak tepat karena anggapan dan pandangan pekerja anak merupakan hal yang lumrah dan normal dilakukan dalam masyarakat India.

Pada masa Pandemi Covid-19, pekerja anak bahkan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi. Dhananjay Tingal, direktur eksekutif dari gerakan Bachpan Bachao Andolan melaporkan dalam waktu 6 bulan, mereka menyelamatkan 1.200 anak yang diperdagangkan secara ilegal untuk dipekerjakan di pabrik atau pertanian, menurutnya ini adalah lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak-anak tersebut terdiri dari usia delapan hingga enam belas tahun, bahkan terdapat anak-anak yang baru berusia enam tahun (Ellis-Petersen and Chaurasia 2020).

Pada tahun 2020 saat terjadi Pandemi Covid-19, masyarakat lokal tidak memiliki pilihan lain selain mempekerjakan anak mereka untuk membantu

perekonomian keluarga mereka selama pandemi. Di negara bagian Telangana di India Selatan, anak-anak harus membantu bekerja sebagai buruh tani dikarenakan orang tua mereka yang kehilangan pekerjaannya pada saat Pandemi demi bertahan hidup. Masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mengirimkan anak mereka untuk pergi bekerja karena mereka juga kehilangan pekerjaan sehingga perekonomian mereka menjadi semakin sulit di masa itu (Sarkar 2020).

Dalam hal ini masyarakat lokal memandang praktik pekerja anak di masa Pandemi menjadi hal yang boleh dilakukan dikarenakan banyak keluarga juga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mengirimkan anak mereka untuk pergi bekerja menjadi salah satu opsi untuk memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan menurut masyarakat lokal, pekerja anak ini jauh lebih dibutuhkan di masa sulit Pandemi Covid-19 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sekolah anak-anak juga ditutup pada masa itu, sehingga anak tidak memiliki kegiatan di luar membantu keluarga mereka. Masyarakat jadi memaklumi keluarga yang mengirimkan anaknya bekerja karena tidak memiliki pilihan lain (Sarkar 2020).

2.3. Upaya Pemerintah India dalam Menangani Pekerja Anak di India

Pekerja anak di India yang telah terjadi bertahun-tahun dan telah mengakar ini, tentunya mendapatkan sorotan dan kecaman baik dari dalam India maupun masyarakat Internasional. Pemerintah India dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah India memberikan upaya atau solusi

yang diharapkan dapat mengurangi pekerja anak di India. Upaya-upaya tersebut adalah:

2.3.1. Kebijakan untuk Tidak Mengizinkan Anak di bawah Umur 14 Tahun untuk Bekerja

Kebijakan untuk tidak mengizinkan anak di bawah 14 tahun untuk bekerja. Kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku di India, di mana hukum di India mengatur mengenai perundang-undangan anak yang mana melarang pekerja anak yang dimasukkan dalam undang-undang *Prohibition and regulation Act* tahun 1986 dan *Juvenile Justice Act*. *Prohibition and regulation Act* tahun 1986 melarang pekerja anak yang mana anak-anak yang belum melewati umur empat belas tahun, dalam pekerjaan tertentu, undang-undang ini juga mengatur mengenai batasan waktu dan jam anak-anak bekerja di mana dilarang untuk mempekerjakan anak lebih dari 3 jam tanpa adanya waktu istirahat setidaknya 1 jam, dan juga diwajibkan untuk memberikan satu hari libur penuh setidaknya sekali seminggu (India 1986). Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, pemerintah mengambil langkah untuk membuat kebijakan untuk tidak memberikan izin dan menetapkan larangan untuk mempekerjakan anak di bawah umur 14 tahun di India (Tamara 2020).

2.3.2. Kebijakan untuk Mengizinkan Anak di atas Umur 14 Tahun untuk Bekerja

Kebijakan untuk mengizinkan anak di umur 14 tahun ke atas untuk bekerja di sektor informal. Dikeluarkannya kebijakan ini oleh pemerintah dikarenakan,

pemerintah menilai bahwa anak yang berada di umur 14 tahun telah dinilai mampu untuk turut ikut serta dalam bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun hal ini juga dibatasi dengan, anak hanya boleh bekerja di sektor informal, seperti membantu bisnis keluarga yang dijalankan oleh keluarganya dan juga di luar jam sekolah (Tamara 2020).

2.3.3. Kebijakan untuk Mengembangkan Kejuruan dalam Minat dan Bakat dan Anak

Kebijakan untuk mengembangkan kejuruan dalam minat dan bakat anak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, dikarenakan selain pendidikan formal, anak-anak dapat mengembangkan diri di luar pendidikan formal dengan melakukan kegiatan pengembangan bakat yang dapat dilakukan di luar jam pendidikan formal. Kegiatan pengembangan bakat ini dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan *skill* di luar pendidikan formal. Kemampuan dan *skill* yang didapatkan dapat digunakan untuk menunjang kemampuan untuk mengembangkan diri dan juga dapat berguna sebagai *skill* tambahan di luar pendidikan formal. Selain itu, dengan adanya pengembangan bakat ini, diharapkan anak-anak dapat juga melatih *skill* dan keterampilan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi yang dapat berguna juga dalam dunia pendidikan maupun saat dewasa dalam dunia profesional (Tamara 2020).

2.3.4. Kebijakan untuk Memberikan dan Mewajibkan Pendidikan dengan Memberikan Pendidikan Gratis

Kebijakan untuk memberikan dan mewajibkan pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis. Di India, pendidikan gratis untuk anak-anak dalam sekolah formal telah diatur dalam undang-undang dasar (Amandemen Delapan Puluh Enam), 2002 dalam Pasal 21-A yang mengatur mengenai Hak Fundamental yang dijamin oleh Konstitusi India dalam memberikan pendidikan gratis dan wajib untuk memberikan pendidikan gratis hingga kelompok anak berusia 14 tahun. Undang-undang Hak Anak atas Pendidikan Gratis dan Wajib "*The right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act*" tahun 2009, menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai dengan standar dan diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi anak-anak. Undang-undang ini diberlakukan sejak April 2010. Pemerintah memberikan kebijakan ini disesuaikan dengan undang-undang yang ada, sehingga diharapkan kebijakan ini dapat menjadi salah satu upaya atau solusi dalam mengatasi pekerja anak di India (Tamara 2020).

2.3.5. Upaya Pemerintah India dalam Menangani Pekerja Anak Selama Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah melakukan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kondisi pekerja anak selama masa Covid-19. Pemerintah ini berusaha untuk mengatasi pekerja anak yang terjadi selama masa Covid-19 dengan melakukan kerjasama

dengan berbagai organisasi *non-governmental* seperti Educo dan *Save the Children*, hingga kerjasama dengan organisasi Internasional seperti ILO dan UNICEF sebagai upaya untuk mencegah dan meningkatkan upaya yang lebih besar dalam memerangi praktik pekerja anak, meningkatkan dana untuk unit anti perdagangan manusia, melakukan operasi prosedur standar, dan menekankan standar terhadap keselamatan kerja (Labor 2020).

2.4 Upaya Pemerintah dalam Membentuk Undang-Undang Pekerja Anak Sesuai dengan Peraturan dan Syarat Pekerja Anak Menurut International Labour Organization

Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India untuk menangani pekerja anak di India, dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah mengupayakan agar kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi Internasional, seperti peraturan yang ditetapkan oleh ILO, yaitu undang-undang No. 20 Tahun 1999 No. 138 tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja, yang menyebutkan bahwa usia minimal anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun sesuai dengan usia anak lulus dari sekolah wajib, namun dalam beberapa kasus pekerjaan ringan, anak dengan usia minimal 13 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan dan tidak berbahaya dengan jumlah jam kerja yang diatur dan dibatasi (ILO 2009b). Namun untuk negara berkembang mendapatkan pengecualian yaitu minimal usia anak untuk bekerja adalah 14 tahun (IPEC 2012). India, yang merupakan negara berkembang juga menetapkan peraturan batasan umur sesuai dengan aturan yang dibuat oleh

ILO yaitu, tidak memperbolehkan pekerja anak di bawah 14 tahun, dan memperbolehkan pekerja anak dengan usia minimal 14, namun hanya untuk pekerjaan yang tidak berbahaya dan dengan jam yang dibatasi (CLPR 1986). Syarat pembatasan jam kerja anak yang ada dalam peraturan ILO, memuat jam kerja yang tidak mengganggu aktivitas pembelajaran anak di sekolah, ataupun mengganggu aktivitas kejuruan yang dapat membantu anak-anak mengembangkan bakat mereka (IPEC 2012). Di India sendiri, dalam undang-undang *Prohibition and regulation Act* tahun 1986 dan *Juvenile Justice Act*. *Prohibition and regulation Act* tahun 1986, mengatur syarat-syarat mengenai peraturan yang harus diikuti untuk mempekerjakan anak berumur 14 hingga 18 tahun yaitu, jangka waktu pekerjaan untuk anak harus ditetapkan dengan jelas sejak awal mulai bekerja untuk menghindari adanya pekerjaan yang dilakukan lebih dari 3 jam, anak-anak harus mendapatkan waktu istirahat setidaknya 1 jam setelah mereka bekerja selama tiga jam, total jam untuk pekerja anak tidak boleh lebih dari 6 jam sehari, termasuk waktu yang dipakai untuk menunggu pekerjaan, pekerja anak tidak boleh bekerja di antara jam 7 malam hingga jam 8 pagi, pekerja anak tidak boleh bekerja lembur, pekerja anak tidak boleh bekerja lebih dari satu pekerjaan, dalam waktu apapun, pekerja anak harus diberikan waktu libur seminggu sekali selama satu hari penuh (IndiaFilings 2018). Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan amandemen pada tahun 2016 menjadi *The Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Act* 2016, perubahan yang ada dalam undang-undang ini adalah adanya perizinan bagi anak-anak di bawah umur 14 tahun untuk bekerja di

“usaha keluarga”, pengurangan daftar pekerjaan berbahaya dan proses berbahaya untuk dikerjakan oleh anak di umur 14, dan memperkuat sanksi bagi para pelanggar dengan hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda 20.000 rupee hingga 50.000 rupee (CLPR 2016). ILO juga mengatur mengenai syarat lainnya yaitu, tidak boleh mempekerjakan anak-anak di sektor atau pekerjaan yang berbahaya baik secara mental, kesehatan pekerja, ataupun moral (IPEC 2012).

Penentuan jenis pekerjaan berbahaya tersebut juga ditentukan dan diatur dalam undang-undang oleh pemerintah negara yang berwenang (IPEC 2012). Menurut peraturan di India anak di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya, pekerjaan berbahaya meliputi beberapa pekerjaan di tempat kereta api seperti pekerjaan pengangkutan penumpang, barang, surat, pengambilan abu, pembersihan lubang, operasi di bangunan di tempat kereta api, bekerja di bagian katering yang mengharuskan untuk berpindah dari satu platform ke platform lainnya atau memotong kereta yang bergerak, di bagian pembangunan ataupun pekerjaan yang letaknya dekat dengan jalur kereta api, pekerjaan di pelabuhan, pekerjaan menjual kerupuk dan di toko kembang api, pekerjaan di rumah jagal, pekerjaan di bengkel mobil, pengecoran, pekerjaan yang berhubungan dengan zat beracun atau mudah terbakar atau bahan peledak, *handloom* atau industri alat tenun listrik, segala jenis pertambangan, pekerja rumah tangga atau pelayan, hotel, motel, atau pusat rekreasi lainnya, menyelam, dan pekerjaan dalam sirkus (IndiaFilings 2018). Dalam Konvensi Usia Minimum No. 138, juga mengatur mengenai setiap pihak berwenang harus memberikan hukuman yang sesuai untuk memastikan

peraturan ini dapat dijalankan dengan efektif. Pemerintah India menetapkan peraturan perundang-undangan pekerja anak (*Prohibition & Regulation) Act*, 1986 yang mengatur mengenai sanksi hukuman dan denda bagi para pelanggar praktik pekerja anak (CLPR 1986).

Pemerintah India mengupayakan membuat undang-undang sesuai dengan rekomendasi kriteria peraturan dari ILO. Tiga kriteria dan aturan dalam undang-undang pekerja anak di India, sesuai dengan rekomendasi dan aturan yang ditetapkan oleh ILO sebagai organisasi internasional yang melindungi pekerja anak di seluruh dunia. Sehingga hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah India dapat sesuai dengan hukum aturan ILO, dan juga dapat disesuaikan dengan kondisi langsung yang ada di India.

BAB 3

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SULITNYA MENGHILANGKAN PEKERJA ANAK DI INDIA

Fenomena pekerja anak merupakan fenomena cukup umum terjadi di berbagai negara, terutama negara berkembang. Fenomena ini didorong oleh berbagai macam faktor yang mendukung adanya praktik pekerja anak. Begitu juga yang terjadi di India, India yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, tentunya memungkinkan untuk mengalami permasalahan pekerja anak ini. Meskipun demikian, fenomena pekerja anak tetap harus diatasi dan diselesaikan. Namun, baik pemerintah maupun organisasi internasional belum dapat tuntas mengatasi masalah pekerja anak di India. Fenomena pekerja anak yang terjadi di India, telah berlangsung sejak lama. Keberlangsungan fenomena pekerja anak di India ini tentunya didukung oleh berbagai macam faktor yang kuat sehingga pekerja anak ini sulit untuk diatasi. Faktor-faktor ini dapat dianalisis menggunakan indikator-indikator yang terdapat di dalam konsep *Violence Triangle* milik Johan Galtung.

3.1. Kekerasan Kultural (Cultural Violence)

Kekerasan kultural dapat menjadi salah satu alat indikator dalam menganalisis fenomena pekerja anak di India. Umumnya kekerasan dapat diidentifikasikan menjadi kekerasan kultural, jika kekerasan tersebut disertai

dengan faktor ***Religion***, ***Ideology***, ***Language***, ***Art***, ***Empirical Science***, ***Formal Science***, dan ***Cosmology*** (Galtung 1990).

3.1.1 Kekerasan Kultural dalam Aspek Religion

Penulis akan menggunakan salah satu aspek dalam kekerasan kultural yaitu berupa faktor ***religion*** dalam menganalisis fenomena pekerja anak di India. Aspek ***Religion*** atau agama adalah salah satu dari tujuh aspek yang dikembangkan oleh Johan Galtung di *Cultural Violence* dalam Konsep *Violence Triangle* miliknya. Aspek ini membahas menjelaskan mengenai bagaimana agama menjadi salah satu faktor atau penyebab dari adanya tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Agama Hindu menjadi agama mayoritas di India. Agama ini memiliki kitab suci yang bernama kitab Weda/Veda. Dalam agama Hindu, terdapat ajaran mengenai kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat Hindu, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, namun selain 4 kasta tersebut, di India terdapat satu kasta lagi yaitu, Dalit (Fikriansyah 2024). Pembagian kasta dalam ajaran agama Hindu memberikan gambaran mengenai *The Chosen* dan *The Unchosen* seperti yang dikembangkan oleh Johan Galtung, yang mana *The Chosen* akan lahir dari kasta tinggi, dan *The Unchosen* akan terlahir dari kasta rendah. Untuk kasta tinggi seperti kasta Brahmana memiliki peranan dalam spiritual atau pemuka agama, kasta Ksatria memiliki peranan dalam pemerintahan, kasta Waisya memiliki peranan pedagang, Sudra memiliki peranan pemulung atau pengemis (Kumparan 2022). Dan untuk kasta Dalit yang ada di India, memiliki kasta yang lebih rendah dari

Sudra hingga disebut sebagai golong "*untouchable*" atau tidak tersentuh, karena mereka menganggap jika menyentuh orang dari kasta Dalit akan membawa kesialan (Rusdiana 2022). Dikarenakan adanya pembagian tatanan sosial yang jelas dalam Kitab Weda, mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat di India jadi mengelompokkan dan membagi-bagi kedudukan manusia sesuai dengan kastanya, hal ini dapat berdampak bagi diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, sarana kesehatan, bahkan tingkat sosial dalam masyarakat. Adanya pembagian kasta dalam kehidupan masyarakat Hindu ini membuat, adanya perbedaan dan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat India. Kasta atas akan mendapatkan kehidupan dan tingkat sosial yang terjamin dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh kasta yang lebih rendah. Kasta bawah tidak akan mendapatkan kehidupan yang sama dengan kasta atas, kasta rendah tidak mendapatkan kemudahan hidup seperti kasta atas, sulitnya akses dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, hal ini didukung dengan ketidakadilan dan kekerasan yang biasa didapatkan oleh kasta rendah.

Ketidakadilan dan diskriminasi yang didapatkan oleh kasta rendah baik di masa sebelum Pandemi maupun di masa Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak di India. Tingkatan dan perlakuan yang didapatkan karena perbedaan kasta memberikan dampak bahkan ke anak-anak. Di mana, anak-anak yang berasal dari keluarga dari kasta bawah dipaksa untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan

keluarganya, hal ini terjadi karena orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan kehilangan pekerjaannya di masa Pandemi membuat anak dalam keluarga tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Kasta yang ada dalam masyarakat menyebabkan orang tua, keluarga, ataupun tulang punggung dalam keluarga kesulitan untuk menjangkau dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dan mapan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dikarenakan kesulitan ini, orang tua atau tulang punggung keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan membutuhkan *income* atau penghasilan tambahan dan salah satu caranya adalah dengan mengirim anak mereka yang bekerja, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor dari adanya praktik pekerja anak dalam keluarga kasta bawah.

Dalam agama Hindu dan Islam laki-laki merupakan pemimpin keluarga perempuan. Di dalam kedua agama ini, laki-laki memiliki posisi penting dalam sebuah keluarga karena peran laki-laki dalam sebuah keluarga adalah wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain itu, dalam kedua agama ini, laki-laki dianggap sebagai pemegang kontribusi terbesar dalam meneruskan garis keturunan, bahkan di India laki-laki dianggap sebagai "*upper class*" atau memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan (Malhotra 2021). Selain itu, status wanita dalam masyarakat India harus selalu memainkan peran bergantung kepada laki-laki, baik orang tua maupun suami. Hal ini menyebabkan laki-laki dianggap lebih berkuasa dan lebih berguna daripada perempuan.

Fenomena ini memberikan dampak terhadap adanya budaya patriarki dalam masyarakat India. Di mana laki-laki dianggap memiliki posisi penting dalam keluarga dan perempuan dianggap sebagai beban dan dianggap tidak produktif (Putri 2022). Dikarenakan adanya anggapan ini, para perempuan seperti para ibu kesulitan untuk memiliki pekerjaan yang setara dan layak seperti laki-laki, yang mana fenomena ini dapat berisiko mengarah kepada pekerja anak. Kelas wanita pekerja di India harus bekerja, meskipun pekerjaan wanita kurang didukung. Rajasthan dan Odisha memiliki level dukungan terhadap pekerja wanita terendah dari negara bagian lainnya, hal ini menyebabkan tinggi kasus pekerja anak di wilayah ini. Semakin rendah dukungan bagi para pekerja wanita, semakin tinggi risiko pekerja anak di wilayah tersebut. Meskipun para ibu bekerja, namun dalam pekerjaan mereka kurang dihargai hanya karena mereka wanita, hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sama bagusnya dengan laki-laki, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengirimkan anak mereka untuk pergi bekerja demi perekonomian keluarga mereka (Kim, Olsen, and Wiśniowski 2023).

Fenomena yang terjadi ini sesuai dengan kekerasan kultural milik Johan Galtung, di mana kasta tinggi di India memiliki berbagai banyak peluang dan keuntungan yang dapat mereka manfaatkan, dibandingkan dengan kasta yang lebih rendah di mana sistem kasta ini memberikan banyak halangan dan keterbatasan bagi kasta bawah. Dikarenakan keuntungan yang didapatkan oleh kasta atas lebih banyak, mereka merasa lebih berkuasa. Kasta rendah tidak memiliki banyak pilihan

seperti kasta atas, sehingga hal ini mendukung adanya praktik pekerja anak dari kasta rendah. Selain itu, perempuan yang diremehkan dikarenakan patriarki yang berkembang dari kedudukan laki-laki dalam agama juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak. Sehingga fenomena ini sesuai dengan penjelasan Johan Galtung di mana kasta tinggi dan laki-laki yang dianggap sebagai *The Chosen* sedangkan kasta rendah dan perempuan dianggap *The Unchosen* yang dapat mengarah terhadap penyebab adanya kekerasan terhadap pekerja anak di India.

3.1.2 Kekerasan Kultural dalam Aspek Ideology

Kekerasan kultural dalam aspek ***Ideology*** yang dijelaskan oleh Johan Galtung Selain anak-anak yang berasal dari kasta rendah dalam agama Hindu di India, anak-anak yang berasal dari agama lain atau minoritas juga menjadi korban dari kejahatan pekerja anak. Aspek ideologi hampir sama dengan aspek agama, di mana dimulai dari *The Chosen* dan *The Unchosen*, namun ideologi merupakan bentuk modern dari konsep *The Chosen* dan *The Unchosen*, Ideologi juga dianggap lebih sesuai dengan perkembangan dunia modern, yang mana *The Chosen* dalam ideologi akan disebut sebagai *Them Self* dan *The Unchosen* akan disebut sebagai *The Other*. Namun sama dengan aspek agama, *The Chosen* atau *Them Self* akan merasa dirinya dan kelompoknya lebih berkuasa dan merupakan orang pilihan Tuhan, dibandingkan dengan *The Other*, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan yang dapat dialami oleh *The Other* yang dianggap tidak dipilih oleh Tuhan (Galtung 1990).

Dari sekian banyaknya ideologi yang berkembang di dunia, terdapat satu Ideologi yang berkembang di India, ideologi tersebut bernama Hindutva. Hindutva pertama kali digunakan oleh seorang pejuang kemerdekaan India bernama Savarkar dalam bukletnya yang berjudul *Essentials of Hindutva* pada tahun 1923. Menurut Savarkar identitas India harus didasarkan oleh budaya dan leluhur yang sama berasal dari agama Hindu. Dengan ini, umat Hindu dianggap sebagai pengikut Tuhan yang terpilih untuk mengikuti ajaran Hindu dan menganggap India penting, dan berbeda dengan orang lain yang tidak mengikuti ajaran agama Hindu dianggap orang luar dan bukan berasal dari India. Dengan demikian, Hindutva melihat komunitas agama lain sebagai bentuk ancaman bagi agama Hindu di India (Raikar 2024).

Hingga kini, tak jarang konflik umat beragama masih terjadi di India. Salah satu konflik antar umat beragama yang paling sering terjadi adalah umat agama Hindu dan umat beragama Muslim. Dalam beberapa tahun belakangan, dikabarkan bahwa terjadi banyaknya konflik kekerasan antar umat beragama Hindu dan Muslim. Menurut laporan yang dilaporkan oleh *Citizen and Lawyers Initiative* menuliskan bahwa konflik umat beragama ini merupakan tanggung jawab dari BJP (*Bharatiya Janata Party*) atau Partai Bharatiya Janata. BJP merupakan salah satu organisasi ekstrimis sayap kanan yang berakar dari kepercayaan terhadap ideologi Hindutva. Bahkan setelah tahun 2014, kaum Muslim merasa semakin terancam oleh organisasi BJP yang berhasil menguasai India. Hal ini diperparah dengan kelompok Hindu garis keras mendeklarasikan bahwa India merupakan negara Hindu dan

memperkuat pengukuhan supremasi Hindu bahkan dalam undang-undang. Pernyataan ini juga didukung dengan agenda BJP yaitu Hindu Nasionalistik, yang mana agenda ini ingin mengucilkan masyarakat yang berasal dari agama minoritas, terutama kaum beragama Muslim (DW 2023).

Efek dari konflik ini menyebar ke berbagai hal, salah satunya adalah sulitnya mencari pekerjaan yang layak bagi keluarga beragama non Hindu. Semenjak BJP yang dipimpin oleh Narendra Modi berkuasa pada tahun 2014, populasi Muslim di India mengalami pergolakan negatif. Orang-orang Muslim yang berjualan sapi mengalami kekerasan dari masyarakat India yang main hakim sendiri. Seperti yang diketahui, sapi merupakan hewan yang dianggap suci dalam agama Hindu. Selain pedagang sapi, massa juga menargetkan usaha pedagang kecil muslim yang lainnya. Selain itu munculnya petisi pelarangan pembangunan masjid dan pelelangan perempuan muslim secara *online*. Bagi anak-anak yang beragama Muslim, mereka mendapatkan ejekan dan sebutan sebagai teroris Pakistan dari teman sekelas mereka karena mereka beragama Muslim. Hal ini menunjukkan bukti penindasan dan diskriminasi masyarakat non Hindu di India (Biswas 2024). Masyarakat beragama muslim kesulitan untuk memiliki pekerjaan yang layak yang dapat menghasilkan banyak uang dikarenakan mereka mengalami diskriminasi yang menyebabkan pilihan pekerjaan mereka menjadi terbatas. Kesulitan perekonomian ini mendorong terjadinya pekerja anak dari kalangan masyarakat Muslim di India. Menurut NSSO (*National Sample Survey Org*) dari pemerintah India, indikasi pekerja anak di India terdiri dari Muslim India, 40% lebih tinggi dari

pekerja anak yang berasal dari agama Hindu, pekerja anak juga ditemukan di agama minoritas lainnya namun dengan *rate* yang lebih rendah (Excelsior 2024).

Fenomena yang terjadi ini memberikan bukti yang sesuai dengan variabel kekerasan kultural milik Johan Galtung dalam aspek ideologi yang dialami oleh pekerja anak di India, di mana *The Chosen* atau *Them Self* merupakan kelompok yang menggunakan ideologi Hindutva, dan kelompok *The Unchosen* atau *The Other* merupakan kelompok yang tidak menggunakan ideologi Hindutva dan berasal dari agama non Hindu. *The Chosen* atau *Them Self* merupakan kelompok superior yang lebih berkuasa dan dominan dari kelompok *The Unchosen* atau *The Other*. Kelompok mayoritas yang menganut ideologi Hindutva, menjadi kelompok dominan yang dapat melakukan kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok non Hindu yang merupakan *The Other*. Dikarenakan perlakuan diskriminasi yang didapatkan oleh kelompok *The Other*, menyebabkan kesulitan bagi keluarga penganut agama non Hindu, hingga berdampak ke anak-anak yang berasal dari *The Other*. Anak-anak juga mendapatkan diskriminasi di sekolah tempat mereka menuntut ilmu yang mana sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar, namun mereka mendapatkan perlakukan buruk dan diskriminasi. Banyaknya keluarga non Hindu yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, akhirnya mengirimkan anaknya untuk bekerja daripada untuk belajar. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok *The Other* ini juga rentan terhadap segala bentuk eksploitasi. Dikarenakan keluarga mereka kesulitan dalam perekonomian yang disebabkan oleh kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan

oleh kelompok *Them Self*, anak-anak dari kelompok *The Other* akan disuruh untuk bekerja dan bahkan dieksploitasi secara paksa untuk bekerja, bahkan hal ini lebih berbahaya bagi anak perempuan dari kelompok *The Other*, karena mereka rentan terhadap eksploitasi dalam pekerjaan seks komersial.

3.2 Kekerasan Struktural (Structural Violence)

Kekerasan struktural menjadi alat indikator kedua yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor penyebab pekerja anak di India. Kekerasan struktural menurut Johan Galtung adalah kekerasan yang telah tertanam dalam struktur yang ada di dalam masyarakat. Kekerasan struktural yang telah tertanam dalam struktur masyarakat ini menyebabkan kekerasan yang telah menjadi suatu kekerasan terstruktur dalam masyarakat, dilihat dan dianggap sebagai kekerasan yang wajar dan tidak dianggap sebagai kekerasan yang berpotensi atau perlu untuk dilaporkan (Galtung 1990).

Dalam fenomena kekerasan anak di India ini, penulis akan menggunakan bagian ini menggunakan variabel dari ***Well-being Needs*** yaitu *Exploitation B*, dan ***Freedom Needs*** yaitu *Marginalization*. Penulis tidak menggunakan ***Survival Needs*** yaitu *Exploitation A* dikarenakan tidak ada exploitasi dalam satu waktu hingga membuat pekerja anak mengalami kematian, tidak menggunakan *Segmentation* dan *Penetration* di ***Identity Needs*** dan *Fragmentation* di ***Freedom Needs*** karena pekerja anak tidak mendapatkan *Segmentation* atau pengelompokkan dalam grup pekerja anak, pemerintah tidak memasukkan pihak berkuasa ke dalam kelompok

pekerja anak untuk mengubah cara pandang mereka seperti penetrasi yang dijelaskan Johan Galtung sebagai penjelasan *Penetration*, dan tidak memecah belah kelompok pekerja anak seperti yang dijelaskan Johan Galtung sebagai penjelasan dari *Fragmentation*.

3.2.1 Kekerasan Struktural dalam Well-being Needs terhadap Pekerja Anak di India

Kondisi kesehatan pekerja anak di India sudah cukup memprihatinkan. Banyak pekerja anak mengalami masalah kesehatan dikarenakan malnutrisi atau kurangnya gizi yang diperlukan anak di umur pertumbuhan yang digunakan untuk tumbuh kembang anak. Kebanyakan orang yang mempekerjakan pekerja anak tidak akan peduli mengenai gizi maupun kesehatan anak yang bekerja pada mereka. Ditambah dengan pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya seperti tambangan, tentu akan membuat pekerja anak lebih rentan terkena penyakit serius yang bahkan didapatkan oleh pekerja dewasa yang bekerja di sektor berbahaya (Nafisah 2018).

Pandemi Covid-19 menaikkan krisis kesehatan yang dialami oleh pekerja anak. Pandemi Covid-19 sendiri merupakan virus ini tentunya berdampak lebih buruk terhadap kesehatan yang bagi pekerja anak. Anak-anak ini dipaksa untuk tetap bekerja untuk mencari uang di bawah ancaman virus yang sedang melanda negaranya. Pekerja anak ini rentan terhadap berbagai masalah kesehatan yang rentan menyerang mereka. Pekerjaan berbahaya lebih sering berhubungan dengan

berbagai bahan-bahan kimiawi, biologis, dan efek secara fisik, atau berdampak secara umum kepada kesehatan psikologi dan kesehatan fisik. Pekerja anak di sektor berbahaya merupakan salah satu pekerjaan dengan aktivitas paling berbahaya, diperkirakan sekitar 73 juta anak dengan rentang umur antara 5-17 tahun bekerja di lingkungan berbahaya dalam rentang sektor yang luas seperti pertanian, pertambangan, konstruksi dan manufaktur, serta hotel, bar, restoran, pasar, dan layanan domestik (Kaur and Byard 2021).

Di daerah pedesaan Andhra Pradesh pekerja anak terlibat dalam pekerjaan produksi biji kapas, di mana mereka bekerja dengan rata-rata selama 12 jam sehari, dengan frekuensi tinggi terekspose langsung dengan pestisida, tanpa adanya ketersediaan alat keamanan. Mereka bahkan tidak menggunakan sepatu, dan kekurangan air untuk mencuci tangan dan baju mereka. Setelah menyemprotkan pestisida, mereka sering menderita iritasi di mata dan kulit dengan pusing dan sakit kepala (Kaur and Byard 2021).

Jam bekerja yang tinggi ini tidak sesuai dengan kondisi fisik pekerja anak di India, jika mereka dipaksa untuk bekerja dengan rentang waktu yang panjang, kondisi ini dapat membuat masalah kesehatan, dikarenakan tubuh anak-anak memang masih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Bahkan pekerja anak di India yang merupakan korban dari *child trafficking* mengalami permasalahan malnutrisi dikarenakan dalam satu hari mereka hanya diberikan makan sekali, selain itu mereka tidak dapat memperoleh makanan di rumah karena mereka sudah dijual sehingga para pekerja anak ini harus tinggal di pabrik tempat mereka bekerja

dan hanya dapat mengandalkan makanan sehari sekali yang diberikan oleh majikan mereka (Insider 2021).

Sebuah studi pada tahun 2019 yang dilakukan di India juga melaporkan bahwa anak-anak yang bekerja sering menderita anemia, infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, dan malnutrisi yang buruk. Studi lain melaporkan bahwa pekerja anak di India juga rentan mengalami penyakit menular lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak bekerja. Jam kerja yang panjang juga memberikan dampak lebih buruk terhadap kesehatan fisik pekerja anak (Abdalla Ibrahim et al. 2019).

Dalam *Exploitation B* milik Johan Galtung menjelaskan bahwa pihak yang dieksploitasi ini akan dieksploitasi secara terus menerus tanpa dipedulikan kesehatannya, hingga mereka mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih dominan. Sehingga fenomena di atas sesuai dengan *Exploitation B* milik Johan Galtung di mana pekerja anak di India dieksploitasi dengan dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya dengan kondisi lingkungan pekerjaan yang berbahaya sehingga mereka mengalami masalah kesehatan seperti iritasi yang didapatkan diakibatkan bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia, tanpa adanya alat perlindungan yang mendukung (Galtung 1990).

3.2.2 Kekerasan Struktural dalam Freedom Needs terhadap Pekerja Anak di India

Konstitusi India mengidentifikasi bahwa keunggulan yang didapatkan dalam sosial didasarkan oleh kasta. *Scheduled Castes* (SC), *Scheduled Tribe* (ST), *Other Backward Caste* (OBC), agama minoritas, dan perempuan dimarginalkan dalam hal pendidikan karena kasta mereka. Grup dari anak-anak yang dimarginalkan didefinisikan sebagai grup anak yang hidup sebagai bagian terendah dari masyarakat pinggiran. Anak-anak yang mengalami marginalisasi ini tidak dapat mendapatkan akses penuh dalam mengontrol hidup dan sumber daya yang menjadi hak mereka. Sehingga, kemampuan mereka untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat menjadi terbatas (Makwana and Elizabeth 2022).

Bagi pekerja anak yang berasal dari kasta rendah atau agama minoritas. Latar belakang dan ekonomi mereka sangat penting untuk menentukan sekolah bagi anak-anak yang termarginalisasi. Mereka hanya bisa bersekolah di sekolah umum milik pemerintah. Diskriminasi di kelas juga menjadi hal yang biasa baik bagi guru maupun bagi murid. Diskriminasi juga terjadi dengan pemisahan ruang kelas, hukuman fisik, pengurangan makanan, membersihkan toilet, hingga kata- kata menghina. Marginalisasi ini sebagian besar dikontribusikan oleh ketidakhadiran siswa yang pergi bekerja (Sanchez 2020).

Dalam pekerjaan, pekerja anak di India juga mengalami marginalisasi, dalam hal upah atau gaji yang diterima. Di mana pekerja anak dan pekerja dewasa dalam pekerjaan yang sama dan jam yang sama, namun pekerja anak mendapatkan

gaji yang berbeda. Pada tahun 2020, anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik digaji sekitar 1.000 rupee per bulan, sedangkan pekerja buruh dewasa mendapatkan bayaran sekitar 15.000 rupee per bulan. Jauhnya perbedaan gaji yang diterima ini dikarenakan adanya marginalisasi dalam dunia pekerja bagi anak-anak. Anak-anak digaji murah karena mereka dianggap bukan pekerja tenaga ahli, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan dapat diupah atau digaji murah. Banyak pemilik pabrik-pabrik kecil di India juga lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja anak dibandingkan pekerja dewasa, karena pekerja anak dapat dibayar dengan upah yang jauh lebih murah namun dengan jam kerja yang sama panjangnya dengan pekerja dewasa (Ellis-Petersen and Chaurasia 2020).

Pekerja anak juga mendapatkan marginalisasi, baik dalam sistem sosial di masyarakat maupun di sektor lingkungan kerja. Dalam lingkungan sosial, pekerja anak di marginalisasi dan dipinggirkan dari masyarakat sehingga menyebabkan mereka kekurangan akses terhadap pendidikan. Sehingga, mereka tidak akan memiliki modal dalam hal sosial dan koneksi yang dapat membantu mereka meningkatkan keadaan mereka. Dalam lingkungan pekerjaan, pekerja anak dipinggirkan dan diperlakukan tidak adil dalam hal pemberian upah yang seharusnya mereka dapatkan (CRY 2024).

Marginalisasi yang didapatkan pekerja anak di India ini sesuai dengan *Marginalization* milik Johan Galtung. Di mana, anak-anak ini dipinggirkan dan didiskriminasi sehingga mereka terjebak dan tidak memiliki kesempatan ataupun kemampuan untuk dapat keluar dari lingkungan tidak sehat yang menyebabkan

mereka menjadi pekerja anak. Dalam hal pekerjaan juga, pekerja anak di India digaji dengan tidak layak, pekerja anak di India kebanyakan tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan ataupun gaji yang seharusnya layak mereka dapatkan, yang mana hal ini dapat menyebabkan pekerja anak terus menerus terjebak dalam lingkungan kerja ini dikarenakan mereka tidak memiliki cukup uang dari upah hasil pekerja anak di India bekerja.

3.3 Kekerasan Langsung (Direct Violence)

Kekerasan langsung merupakan variabel ketiga yang digunakan Johan Galtung dalam konsep *Violence Triangle* miliknya. *Direct Violence* atau kekerasan langsung menurut Johan Galtung adalah kekerasan yang dialami langsung oleh seseorang secara fisik yang dapat dirasakan dan dilihat dengan kasat mata, Berbeda dengan *Cultural Violence* dan *Structural Violence* yang tidak dapat dilihat secara langsung atau *Invisible*, *Direct Violence* dapat dilihat secara langsung atau *Visible* karena bentuk kekerasannya merupakan luka fisik maupun mental yang didapatkan korban (Galtung 1990).

Penulis akan menggunakan variabel ***Well-being Needs*** pada bagian *Maiming* dan *Misery*, dan ***Identity Needs*** pada bagian *Desocialization* dan *Resocialization*. Penulis tidak akan menggunakan *Killing* ***Survival Needs*** karena pekerja anak tidak memberontak pada saat bekerja yang dapat menyebabkan kematian, kemudian *Siege* dan *Sanctions* ***Well-being Needs*** karena pemerintah India tidak menahan pekerja anak, dan tidak menegakkan keadilan bagi pekerja

anak dengan cara mengambil hak asasi manusia lainnya. Penulis tidak menggunakan *Secondary Citizen* ***Identity Needs*** karena pekerja anak tidak dipaksa melakukan budaya dari kelompok yang lebih berkuasa, dan juga penulis tidak akan menggunakan ***Freedom Needs*** *Repression, Detention,* dan *Explusion* pekerja anak tidak dibatasi, ditahan dengan pemerintah, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk bepergian ke luar negeri.

3.3.1 Kekerasan Langsung dalam Well-being Needs terhadap Pekerja Anak di India

Pekerja anak juga memberikan berbagai macam penderitaan bagi anak-anak. Di Telangana yang merupakan salah satu negara bagian India yang terletak di bagian tenggara, ditemukan tubuh seorang anak yang telah meninggal dengan bekas memar, perban bedah, dan bercak darah kering, yang diperkirakan berumur 12 tahun. Setelah diselidiki oleh polisi, nama, umur, dan alamat anak tersebut palsu dan dibuat ulang. Diketahui anak tersebut bekerja di sebuah pabrik pembuat gelang di Falaknuma. Anak tersebut merupakan korban dari penjualan anak dari Bihar bagian wilayah timur India, dan dipaksa untuk bekerja di sebuah pabrik lebih dari 14 jam sehari. Dia meninggal dikarenakan tuberkulosis, yang diperparah dengan gizi buruk dan lingkungan yang kasar di pabrik. Enam bulan sebelumnya, ditemukan juga mayat anak laki-laki yang meninggal dikarenakan masalah kesehatan akibat kekerasan fisik di salah satu pabrik pembuatan gelang di kota itu (Minhaz 2017).

Pada tahun 2024, ditemukan mayat seorang pekerja anak perempuan berusia 15 tahun yang diduga merupakan korban penyiksaan dan kekerasan fisik dari majikannya. Kasus ini terjadi di Chennai, dimana menurut Investigasi dari polisi Chennai, anak perempuan ini dipekerjakan dari bulan Desember 2023 untuk merawat anak dari keluarga tersebut. Polisi mengungkapkan bahwa pekerja anak perempuan ini mengalami kekerasan fisik yang ekstrim, dimana terdapat luka bakar dari setrika panas dan puntung rokok di tubuh korban. Pekerja anak perempuan ini mendapatkan kekerasan fisik yang *extreme*, yang mana kekerasan fisik ini menyebabkan penderitaan dan kesakitan fisik bagi pekerja anak perempuan tersebut, namun pekerja anak tersebut tidak mendapatkan penanganan seharusnya sehingga menderita kesakitan dan dibiarkan mati (Mukherjee 2024).

Baik pekerja domestik maupun pekerja sektor berbahaya. Semua sektor pekerjaan yang dilakukan pekerja anak dapat memberikan risiko terhadap kekerasan yang dapat menyebabkan kematian. Pekerja anak dalam sektor domestik rentan untuk mengalami kekerasan fisik hingga seksual yang dapat dirasakan setiap hari dikarenakan harus bekerja di rumah majikannya. Kemudian, pekerja anak yang bekerja di pekerjaan berbahaya seperti pertambangan atau pabrik rentan terhadap kondisi kesehatan fisik yang buruk karena bekerja di tempat yang berbahaya yang dapat menyebabkan anak terbunuh, atau terluka atau sakit sebagai konsekuensi dari kurangnya standar kesehatan dan keselamatan dan kurangnya pengaturan pekerjaan yang sesuai standar. Hal ini dapat mengakibatkan efek masalah kesehatan, masalah psikologi, hingga menyebabkan cacat fisik atau ketunaan (Kaur and Byard 2021).

Kekerasan yang dialami oleh pekerja anak di India di atas sesuai dengan variabel *Maiming* dan *Misery* milik Johan Galtung. Di mana pekerja anak di India mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi mereka. Yang mana pekerja anak di sektor rumah tangga ataupun pekerja anak di sektor berbahaya rentan untuk mengalami kekerasan fisik dari majikan mereka, kekerasan fisik ini dalam menyebabkan permasalahan kesehatan dan kematian. Sehingga kasus-kasus di atas sesuai dengan variable *Maiming* dan *Misery* milik Johan Galtung karena para pekerja anak di India mengalami berbagai masalah kesehatan dan kekerasan dikarenakan lingkungan kerja yang buruk dan berbahaya, gizi yang tidak tercukupi, hingga kekerasan fisik di tempat kerja yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan serius, lingkungan kerja yang buruk, hingga dapat menyebabkan kematian.

3.3.2 Kekerasan Langsung dalam Identity Needs terhadap Pekerja Anak di India

Pekerja anak Muslim di India harus menyembunyikan identitas muslim mereka. Para pekerja anak di India harus menggunakan nama yang terdengar Hindu dan tidak boleh menggunakan nama asli mereka. Hal ini dikarenakan, jika identitas mereka terungkap sebagai muslim, mereka dapat dipecat.

Pekerja anak muslim di India yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harus menggunakan nama palsu, dan menyembunyikan nama asli mereka. Jika ketahuan, mereka tidak akan dipekerjakan, dikarenakan masyarakat muslim dianggap orang jahat. Bahkan demi mengurangi kecurigaan, para orang tua mereka

akan menggunakan sari dan bindi yang diasosiasikan sebagai pakaian masyarakat Hindu. Bahkan mereka juga tetap bekerja di hari raya Idul Fitri untuk menghindari kecurigaan. Identitas mereka sebagai muslim tidak boleh diketahui apabila mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan tidak di diskriminasi berdasarkan agama. Kebanyakan masyarakat Hindu jika mengetahui orang yang ingin bekerja dengan mereka adalah muslim, mereka memilih untuk tidak jadi mempekerjakan orang tersebut (Mazaya 2022).

Pelarangan identitas muslim dalam pekerja anak di India ini sesuai dengan *Decosialization* dan *Resocialization* milik Johan Galtung dalam variabel ***Identity Needs***. Di mana identitas pekerja anak muslim yang bekerja di India tidak dapat mengaku identitas mereka sebagai warga muslim, membuat pekerja anak muslim di India terpaksa untuk berpura-pura mengganti identitas mereka menjadi Hindu. Bila mereka bekerja di sektor rumah tangga, dan identitas muslim mereka terbongkar mereka dapat mendapatkan diskriminasi, kekerasan, hingga dipecat, dikarenakan majikan mereka yang mayoritas beragama Hindu tidak mau mempekerjakan orang dari agama Muslim. Sehingga fenomena ini sesuai dengan *Decosialization* dan *Resocialization* milik Johan Galtung yaitu pekerja anak muslim tidak dapat melakukan dan bebas menunjukkan identitas mereka sebagai muslim, bahkan mereka harus terpaksa berpura-pura menjadi masyarakat Hindu selama bekerja demi mereka tidak dipecat dari pekerjaan mereka (Galtung 1990).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Praktik pekerja anak di India merupakan sebuah praktik yang telah lama terjadi dari tahun ke tahun. Saking lamanya, mayoritas masyarakat di India menganggap praktik pekerja anak merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari pembentukan undang-undang mengenai minimal usia pekerja anak dan pekerjaan berbahaya yang tidak boleh dilakukan oleh pekerja anak sesuai dengan peraturan Konvensi ILO hingga membentuk berbagai kebijakan atau program seperti kebijakan pengembangan bakat dan sekolah gratis. Meskipun telah berhasil mengurangi praktik pekerja anak pada tahun 2011 dan melakukan ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 dan nomor 182 pada tahun 2017, namun kekerasan terhadap praktik pekerja anak masih terjadi hingga sekarang.

Faktor penyebab dari terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak ini dapat dianalisis dengan menggunakan *Violence Triangle* milik Johan Galtung. *Violence Triangle* milik Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan terbagi menjadi 3 bagian yaitu, kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Yang mana ketiga aspek ini memiliki keterkaitan dan saling berhubungan dalam praktik pekerja anak di India dan mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak di India.

Setelah melakukan analisis, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan kultural yang ada dalam masyarakat India menjadi akar penyebab yang melatarbelakangi dari adanya fenomena kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang dialami oleh pekerja anak di India. Penelitian ini menemukan kekerasan kultural dalam aspek agama, ajaran agama digunakan untuk menyulitkan kehidupan beberapa kelompok masyarakat di India. Agama mayoritas di India adalah agama Hindu, di mana dalam agama Hindu terdapat adanya ajaran mengenai kasta. Masyarakat dengan kasta yang rendah rentan untuk mendapatkan perlakukan tidak adil dan diskriminasi dari kasta yang lebih tinggi. Masyarakat berkasta rendah juga kerap kali menerima perlakuan semena-mena dari kasta yang lebih tinggi Hal ini menyebabkan kasta-kasta yang lebih rendah kesulitan untuk memiliki dan menjangkau pekerjaan dengan gaji yang layak, dikarenakan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, masyarakat kelompok kasta rendah terpaksa mengirimkan anak mereka untuk pergi bekerja demi dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, akibat dari ajaran dalam agama juga menghalangi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya anggapan bahwa perempuan tidak berguna membuat peran perempuan pekerja semakin diremehkan, perempuan jadi tidak dapat memiliki pekerjaan yang sama layaknya dengan laki-laki. Dikarenakan hal ini perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mereka perlu mengirimkan anak untuk pergi bekerja untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek Ideologi melatarbelakangi kekerasan yang didapatkan oleh pekerja anak non Hindu di India. Ideologi Hindutva yang berkembang dalam masyarakat India memberikan kesulitan terutama bagi masyarakat beragama non Hindu. Masyarakat non Hindu seperti masyarakat Islam rentan untuk mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Fenomena ini membuat masyarakat Islam di India kesulitan untuk memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan layak. Dikarenakan sulit memiliki pekerjaan yang layak, para keluarga Islam di India kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Adanya kebutuhan keluarga yang harus dicukupi namun kurangnya penghasilan, membuat orang tua tidak memiliki pilihan lain selain menyuruh atau mengirimkan anak mereka untuk pergi bekerja. Anak dari keluarga Islam di India harus bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kemudian dampak dari kekerasan kultural ini menyebabkan pekerja anak mengalami fenomena kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Dalam kekerasan struktural pada aspek *well-being needs*, penelitian ini menemukan bahwa kondisi kesehatan pekerja anak di India cukup memprihatinkan. Pekerja anak di India rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang mana hal ini diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang anak-anak lakukan. Pekerjaan berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak ini, dilakukan tanpa adanya alat keselamatan yang memadai. Mereka terekspos langsung dengan senyawa kimia berbahaya seperti pestisida dalam frekuensi jam kerja yang tinggi hingga 12 jam sehari, pekerjaan ini dapat menimbulkan permasalahan kesehatan seperti iritasi

kulit, anemia, infeksi saluran pernafasan. Selain itu, mayoritas majikan dari pekerja anak ini tidak memperdulikan kondisi fisik dan membatasi makanan pekerja anak, sehingga menyebabkan pekerja anak di India juga mengalami malnutrisi.

Kemudian penelitian ini menemukan dari aspek *marginalization*, pekerja anak di India mendapatkan marginalisasi atau dipinggirkan, baik dalam masyarakat dan juga tempat kerja. Di dalam masyarakat pekerja anak ini tidak mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak mereka. Pekerja anak di India kesulitan untuk memperoleh hak mereka seperti hak pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan yang layak. Bahkan dalam lingkungan sekolah, pekerja anak di India juga tetap mengalami diskriminasi dan marginalisasi, baik dari teman sekelas mereka hingga guru. Sedangkan di dalam lingkungan pekerjaan, pekerja anak didiskriminasi dan dimarginalkan dalam hal upah atau gaji yang seharusnya mereka terima, di mana untuk pekerja dewasa menerima sekitar 15.000 rupee per-bulan, sementara pekerja anak hanya menerima sekitar 1.000 rupee per-bulan. Sehingga penelitian ini menemukan bahwa marginalisasi yang ada dalam pekerja anak, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan, menyebabkan pekerja anak semakin dipinggirkan dan dikucilkan pekerja anak sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak mereka baik pendidikan maupun hak gaji mereka yang seharusnya.

Dalam kekerasan langsung aspek *well-being needs*, penelitian ini menemukan bahwa pekerja anak di India rentan untuk mengalami kematian dikarenakan kondisi lingkungan pekerjaan mereka yang tidak aman. Dalam sektor

pekerjaan domestik, pekerja anak rentan untuk mengalami kekerasan dari majikan mereka, pekerja anak ini juga tidak dapat meminta tolong kepada orang lain dikarenakan bekerja di lingkungan rumah, sehingga jika pekerja anak ini mengalami penderitaan atau kekerasan fisik parah, kebanyakan dari majikan akan membiarkan kesakitan yang dialami oleh pekerja anak hingga dibiarkan mati. Selain itu, lingkungan sektor pekerjaan berbahaya seperti pabrik atau pertanian membuat pekerja anak rentan mengalami berbagai permasalahan kesehatan, hal ini didukung dengan lingkungan kerja yang buruk tanpa adanya peralatan keselamatan yang memadai bagi para pekerja yang membuat pekerja anak rentan untuk mengalami kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, kekerasan fisik di lingkungan kerja, hingga dapat menyebabkan kematian.

Dan dalam aspek *decosialization* dan *resocialization*, penelitian ini menemukan bahwa Pekerja anak yang beragama muslim di India harus menyembunyikan identitas mereka sebagai muslim. Para pekerja anak ini bahkan berpura-pura beragama Hindu dengan menggunakan nama palsu yang lebih terdengar Hindu hingga menggunakan pakaian tradisional masyarakat Hindu. Bahkan pada hari raya keagamaan seperti hari raya idul fitri, mereka tetap bekerja dan tidak mengambil demi menghindari kecurigaan majikan mereka. Sehingga pekerja anak muslim di India harus terpisah dengan identitas mereka sebagai muslim, pekerja anak terpaksa untuk menutupi identitas muslim mereka dikarenakan mereka dapat dipecat dari pekerjaannya ataupun pekerja anak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan jika identitas muslim mereka diketahui.

Sehingga fenomena-fenomena inilah yang menyebabkan pemerintah belum dapat mengatasi kekerasan terhadap pekerja anak di India meskipun telah meratifikasi Konvensi ILO dan memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pekerja anak. Jika kekerasan kultural yaitu aspek agama dan aspek ideologi belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah, maka fenomena pekerja anak dalam masyarakat India akan terus terjadi, dan jika fenomena pekerja anak ini terus terjadi, maka fenomena kekerasan terhadap pekerja anak, baik kekerasan struktural maupun kekerasan langsung akan terus dialami oleh para pekerja anak di India.

4.2. Rekomendasi

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih memiliki kekurangan dikarenakan banyaknya keterbatasan sumber bacaan dan data yang terbatas. Penelitian ini berfokus terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan bagi pekerja anak di tahun 2017-2024, namun penelitian ini tidak membahas mengenai peran organisasi internasional dalam menangani kekerasan yang didapatkan oleh pekerja anak di India. Sehingga penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya membahas mengenai peran dan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk melindungi pekerja anak dari kekerasan dan upaya untuk menangani kekerasan terhadap pekerja anak di India.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Wandi. 2022. "ANALISIS PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK DI INDIA" 1.

Biswas, Soutik. 2024. "India: Bagaimana rasanya menjadi Muslim di negara yang dipimpin Narendra Modi?" BBC News Indonesia. April 29, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cglvz4epkyvo.

Callista, Natasha. 2022. "KENDALA UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM USAHA KASUS MENGURANGI PEKERJA ANAK DI INDIA." *JOM FISIP 9*.

CLPR. 1986. "THE CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986."

———. 2016. "The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016." *Ministry of Labour & Employment, Goverment of India*.

CRY. 2024. "The Intersection of Poverty and Child Labour in India." CRY - Give Children a Happy, Healthy and Creative Childhood | CRY - India's Leading Non-Profit. September 8, 2024. https://www.cry.org/blog/the-intersection-of-poverty-and-child-labour/.

DW. 2023. "Inilah Faktor Pemicu Kekerasan Antar Agama di India." dw.com. August 11, 2023. https://www.dw.com/id/kekerasan-antaragama-di-india/a-66500328.

Ellis-Petersen, Hannah, and Manoj Chaurasia. 2020. "Covid-19 Prompts 'enormous Rise' in Demand for Cheap Child Labour in India." *The Guardian*, October 13, 2020, sec. World news. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/13/covid-19-prompts-enormous-rise-in-demand-for-cheap-child-labour-in-india.

Excelsior, Daily. 2024. "Deciphering the State of Child Labour in India." *Daily Excelsior* (blog). April 30, 2024. https://www.dailyexcelsior.com/deciphering-the-state-of-child-labour-in-india/.

Fikriansyah, Ilham. 2024. "Mengenal Dalit, Kasta Terendah di India yang Mendapat Diskriminasi." detikedu. 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7245870/mengenal-dalit-kasta-terendah-di-india-yang-mendapat-diskriminasi.

Firdausi, Aulya Della, and Martien Herna Susanti. 2018. "Upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Bppkb) dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Kabupaten Kendal" 2 (2).

Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27 (3): 291–305.

Ibrahim, Abdalla, Salma M Abdalla, Mohammed Jafer, Jihad Abdelgadir, and Nanne De Vries. 2019. "Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impacts of Child Labor on Child's Health in Low- and Middle-Income Countries." *Journal of Public Health* 41 (1): 18–26. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy018.

Ibrahim, Amien. 2022. "Sejarah Inggris Jarah Harta India USD45 Triliun selama Penjajahan 200 Tahun." SINDOnews Internasional. 2022.

https://international.sindonews.com/read/957083/45/sejarah-inggris-jarah-harta-india-usd45-triliun-selama-penjajahan-200-tahun-1669878749.
ILO. 1999. “Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).” 1999. https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182.
———. 2009a. “K138 Usia Umum Untuk Diperbolehkan Bekerja.” In . ILO.
———. 2009b. *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta: OPI.
India, Government of. 1986. “CHILD LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986 | Chief Labour Commissioner.” 1986. https://clc.gov.in/clc/acts-rules/child-labour-prohibition-and-regulation-act-1986.
———. 2011. “State Wise Details of Working Children in the Age Group of 5-14 Years as per Census 2001 and Census 2011.”
———. 2015. “Provisions Ministry of Labour & Employment|Government of India.” 2015. https://labour.gov.in/childlabour/provisions.
IndiaFilings. 2018. “Child Labour Law and Regulations in India.” *IndiaFilings - Learning Centre* (blog). February 7, 2018. https://www.indiafilings.com/learn/child-labour-law-regulations-in-india/.
Insider, CNA, dir. 2021. *How COVID-19 Created India’s Broken Generation Of Children | Insight | Full Episode*. https://www.youtube.com/watch?v=_ttV-GhSHpE.
International, Save The Children. 2022. “COVID-19 Left Children in India Anxious, Facing More Violence, with Rise in Child Labour – Study.” Save the Children International. July 5, 2022. https://www.savethechildren.net/news/covid-19-left-children-india-anxious-facing-more-violence-rise-child-labour-study.
IPEC. 2012. “STANDAR PEKERJA ANAK INTERNASIONAL.” ilo org. 2012. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_617237.pdf.
Kaur, Navpreet, and Roger W Byard. 2021. “Prevalence and Potential Consequences of Child Labour in India and the Possible Impact of COVID-19 – a Contemporary Overview.” *Medicine, Science and the Law* 61 (3): 208–14. https://doi.org/10.1177/0025802421993364.
KBRI. 2018. “KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI NEW DELHI, MERANGKAP KERAJAAN BHUTAN REPUBLIK INDIA.” Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia. 2018. https://kemlu.go.id/newdelhi/id.
Kim, Jihye, Wendy Olsen, and Arkadiusz Wiśniowski. 2023. “Predicting Child-Labour Risks by Norms in India.” *Work, Employment and Society* 37 (6): 1605–26. https://doi.org/10.1177/09500170221091886.
Kumparan. 2022. “Mengenal Sistem Kasta di India dari yang Tertinggi hingga Terendah.” kumparan. 2022. https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-sistem-kasta-di-india-dari-yang-tertinggi-hingga-terendah-1yo3iUA9r7m.
Labor, The U.S Department of. 2020. “2020 Findings on the Worst Forms of Child Labour: India.” India: The U.S Department of Labor.

Makwana, Gautam, and H Elizabeth. 2022. “CHALLENGES FOR CHILDREN FROM MARGINALISED INDIAN COMMUNITIES.” *VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY* 1 (1): 60–67. https://doi.org/10.47413/vidya.v1i1.109.

Malhotra, Anshu. 2021. “State, Patriarchy, and Muslim Women in India: A Historical Perspective on the Anti-CAA Protests.” *Global-e* 14 (4). https://globalejournal.org/global-e/march-2021/state-patriarchy-and-muslim-women-india-historical-perspective-anti-caa.

Mazaya. 2022. “Karena ketakutan, pekerja rumah tangga Muslim di India mengubah nama mereka.” Arrahmah.id. September 9, 2022. https://www.arrahmah.id/karena-ketakutan-pekerja-rumah-tangga-muslim-di-india-mengubah-nama-mereka/.

Minhaz, Ayesha. 2017. “Millions of Kids in Danger: Why India Struggles with a Massive Child Labour Problem.” The NEWS Minute. 2017. https://www.thenewsminute.com/delve/millions-kids-danger-why-india-struggles-massive-child-labour-problem-70661.

Mondal, Tanushree Pandey, Manisha. 2021. “Covid Made India’s Child Labour Problem Bigger. In Rajasthan, They Slog 18 Hrs/Day for Rs 50.” ThePrint. September 13, 2021. https://theprint.in/india/covid-made-indias-child-labour-problem-bigger-in-rajasthan-they-slog-18-hrs-day-for-rs-50/732625/.

Mukherjee, Vasudha. 2024. “Chennai Domestic Help Murder: Are Domestic Workers Legally Protected?” November 4, 2024. https://www.business-standard.com/india-news/chennai-teen-domestic-help-s-murder-are-the-laws-equipped-to-protect-them-124110400456_1.html.

Nafisah, Nada. 2018. “UPAYA ILO DALAM MENANGANI EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDIA MELALUI CONVERGING AGAINST CHILD LABOR: SUPPORT FOR INDIA’S MODEL.”

NCRB. 2024. “CHILD TRAFFICKING.” 2024. https://pib.gov.in/pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2039058.

Poddar, Shuvabrata, and Urbi Mukherjee. 2020. “Ascending Child Sexual Abuse Statistics in India During COVID-19 Lockdown: A Darker Reality and Alarming Mental Health Concerns.” *Indian Journal of Psychological Medicine* 42 (5): 493–94. https://doi.org/10.1177/0253717620951391.

Putri, Grace Inka. 2022. “Upaya Penanganan Diskriminasi Gender di India dalam Perspektif Feminisme.” kumparan. 2022. https://kumparan.com/grace-inka-putri/upaya-penanganan-diskriminasi-gender-di-india-dalam-perspektif-feminisme-1xMKg3icMxY.

Raikar, Sanat Pai. 2024. “Hindutva | Definition, Origin, History, & Facts | Britannica.” October 30, 2024. https://www.britannica.com/topic/Hindutva.

Ray, Ranjan. 2001. “CHILD LABOUR AND CHILD SCHOOLING IN SOUTH ASIA.”

Rusdiana. 2022. “Dalit, Kasta Yang Haram Disentuh Dalam Stratifikasi Masyarakat India - Espos.Id | Espos Indonesia.” 2022. https://dunia.espos.id/dalit-kasta-yang-haram-disentuh-dalam-stratifikasi-masyarakat-india-1244900.

Safitri, Annisa Kurnia. 2022. “PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2011-2019 SKRIPSI.”

Sanchez, Benjamin Arenas. 2020. “HIGHLIGHTING THE IMPACTS OF CASTES ON CHILDREN’S ACCESS TO EDUCATION IN INDIA.”

Sarkar. 2020. “India Faces Lost Generation as Covid-19 Pushes Children to Work.” Hindustan Times. August 10, 2020. https://www.hindustantimes.com/india-news/india-faces-lost-generation-as-covid-19-pushes-children-to-work/story-hIbEkV1pEhQAmkWwR9S8rO.html.

Soni, Mayank. 2021. “COVID-19 Has Likely Worsened the Situation of Child Labourers in India: Educo and Campaign Against Child Labour Lead Efforts to Bring Together Stakeholders to Help End Child Labour - India | ReliefWeb.” July 5, 2021. https://reliefweb.int/report/india/covid-19-has-likely-worsened-situation-child-labourers-india-educo-and-campaign-against.

Tamara, Fandy. 2020. “PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.”

UNICEF. 2024. *Child Labour and Schooling in India A Reappraisal*.